URGENSI DAKWAH DALAM NEGARA
AKHMAD SUKARDI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
akhmadsukardi.iainkendari@gmail.com

ABSTRAK

Keterkaitan antara Negara dan dakwah tercermin dalam perilaku Rasulullah saw. Beliau telah memikul dua tanggung jawab, sebagai pemimpin agama yang punya kewajiban menyampaikan dakwah kepada umat dan sebagai kepala Negara, punya tanggung jawab bagi berlangsungnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Dakwah adalah sebuah proses atau kegiatan yang berkesinambungan terhadap aktivitas – aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki, membina, dan membentuk masyarakat yang bahagia dan sejahtera, sedang Negara yang dimaksud dalam tulisan ini adalah dukungan dan partisipasi negara terhadap proses penyampaian dakwah baik negara pada zaman nabi Muhammad saw hingga negara Indonesia. Dakwah dapat berperan dalam Negara Indonesia yang kita cintai, jika negara dalam hal ini pemerintah dapat memberikan dukungan dan partisipasi negara terhadap proses dakwah. Sebaliknya dakwah akan selalu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, jika dakwah dijadikan sebagai wadah penyampaian berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Kata-kata Kunci : Dakwah, Negara

PENDAHULUAN

Ketika Nabi Muhammad saw. melakukan hijrah ke Madinah, beliau membuat sebuah perjanjian antara berbagai kelompok masyarakat, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar, suku Khazraj dan Aus, serta kaum Yahudi. Perjanjian itu dituangkan ke dalam naskah tertulis yang menandai berdirinya Daulah Islamiyah (Negara Islam). Dari isi perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Nabi di Madinah selain sebagai pemimpin agama atau tokoh dakwah, juga sebagai kepala Negara.

Dakwah adalah suatu proses yang berkesinambungan terhadap aktivitas-aktivitas dinamis yang bertujuan untuk memperbaiki, membina, dan membentuk masyarakat yang bahagia melalui ajakan yang berkesinambungan kepada yang ma'ruf serta mencegah kepada yang mungkar dalam artian yang seluas luasnya.

Dengan kata lain, untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan manusia, maka dakwah harus dilaksanakan secara terus menerus sampai dunia kiamat.

Dakwah dalam Islam memiliki posisi sentral dan strategis, karena itulah yang menjadi barometer perubahan sosial yang akan membentuk struktur nilai dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks dakwah Islam merupakan bagian integral yang merupakan roh bagi upaya gerakan dakwah yang intinya adalah berupa proses transmisi transformasi, dan sosialisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam ke dalam pola kemasyarakatan. Untuk itu Islam sebagai agama dakwah memberikan kunci jalan keluar bagi problematikanya, yakni optimisme untuk bersaing, baik dalam pengetahuan maupun aplikasi sosial atau amal saleh.

Masyarakat muslim Indonesia sebagian berada dalam zaman teknologi informasi sebagai ciri masyarakat gelombang ketiga setelah masyarakat modern dan industrialis. Teknologi informasi ibarat pedang bermata dua, tinggal siapa, bagaimana dan untuk apa digunakan. IT bisa digunakan untuk dakwah tapi juga bisa digunakan untuk sebaliknya.

Penggunaan IT dalam proses dakwah di Indonesia masih belum optimal, bahkan sampai hari ini masih banyak yang menyindir ketertinggalan kemampuan teknologi bangsa Indonesia dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu pengembangan dakwah dengan menggunakan IT sangat penting, karena dakwah merupakan kaki tangan Negara yang segala geraknya harus atas proses dakwah. Tanpa kegiatan dakwah, agama dan Negara akan mengalami kevakuman dan stagnasi dalam perkembangannya. Dakwahlah yang menjadikan Islam berkembang pesat sampai ke Indonesia.

Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengakui perjuangan umat Islam dalam membela negara sampai Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, bila dakwah berhenti berarti lonceng kematian agama telah berbunyi. Demikian halnya dakwah dalam Negara harus mendapat tempat dan sebaiknya ada dukungan dari pemerintah (Negara). Bila dakwah berhenti, maka otomatis pula aktivitas kenegaraan mandek sehingga keduanya tidak bisa saling melepaskan. Dakwah tidak akan berjalan secara mulus tanpa dukungan negara, demikian pula sebaliknya Negara tidak akan berjalan sebaik mungkin tanpa keberadaan negara.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dakwah

Istilah dakwah adalah isim masdar dari akar kata da'a – yad'uu – da'watan (Yunus t.th; 127) yang berarti seruan, panggilan, ajakan, dan jamuan. Kata dakwah sering kali orang mengidentikkannya dengan seruan-seruan atau panggilan-panggilan serta penyampaian pesan-pesan keagamaan. Jarang orang yang mengartikan dan mempersamakan istilah dakwah dengan komunikasi, padahal terma dakwah dan komunikasi kedua-duanya bisa berarti menyampaikan pesan dan nasehat yang berisikan urusan duniawi maupun ukhrawi.

Pengidentikan orang terhadap makna dakwah dengan urusan keagamaan, juga dalam kamus diartikan seperti itu misalnya bermakna penyiaran, propaganda, penyiaran agama dan pengembangannya dikalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999; 205)

Dari pengertian di atas, penulis mengajak untuk memahami dakwah secara luas dalam arti mempersamakan dengan komunikasi dan tidak memberikan makna yang terbatas, karena jika dimaknai secara terbatas dikhawatirkan akan memberikan makna yang simbolik yang tak memberikan keuntungan. Demikian pula tidak akan mampu melihat peran serta Nabi sebagai da'i dan negarawan. Oleh Karena itu, dakwah dalam judul ini diartikan sebagai komunikasi, penyiaran, propaganda yang dapat memberikan manfaat dalam proses bernegara. Selain itu sejauhmana ia memberikan nilai positif bagi keberadaannya dalam Negara, sehingga dakwah diartikan dalam perspektif yang lebih luas.

Kata selanjutnya adalah Negara. Berbicara masalah Negara tidak akan lepas dari politik, karena jabatan-jabatan kenegaraan dan seluruh komponen yang terkait dengan Negara terealisasi dan teraplikasi melalui cara politik. Negara juga tak akan pernah lepas dengan terma idiologi. Idiologi menurut Abdul Muis Salim identik dengan cita-cita, karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud sehingga dapat diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai makhluk *abid* yang diberi kedudukan khalifah dalam membangun kemakmuran di muka bumi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.(Salim, 1995; 298). Negara bermakna organisasi di suatu wilayah yang

mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999; 685). Negara berarti pula wadah membangun, menyelesaikan dan mengatur segala tata laku kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar termasuk manusianya.

Terbentuknya sebuah Negara tidak bisa lepas dari adanya wilayah dan warga Negara. Keberadaan warga negaralah yang mengilhami terbentuknya tatanan kenegaraan. Menurut Haikal, kehidupan bernegara bagi umat islam baru dimulai pada waktu Nabi berhijrah dan menetap di Madinah.(Munawir Sjadzali, 1990; 183). Sedangkan terbentuknya Indonesia sebagai negara melahirkan berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan pada saat Gajah Mada, Majapahit, kerajaan Mataram dan lain-lain. Tetapi resmi sebagai Negara yang diakui oleh PBB nanti pada tanggal 17 Agustus 1945.Berdasarkan penjelasan di atas, Negara yang dimaksud dalam judul ini adalah dukungan dan partisipasi Negara (baik Negara pada zaman Nabi Muhammad saw. hingga Negara Indonesia) terhadap proses penyampaian dakwah (dalam arti seluas-luasnya).

B. Hubungan Dakwah Dan Negara

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa dakwah harus dipahami secara luas. Ketika memperbincangkan dakwah, maka antara lain yang teringat dalam nalar kita adalah agama, karena mustahil agama (apapun) berkembang tanpa adanya dakwah. Dakwahlah yang menjadi wadah bagi pendistribusian konsep *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* yang berisikan ajakan kepada manusia untuk melakukan yang baik-baik dan menghindari yang munkar. Dengan demikian, dalam melihat hubungan dakwah dan Negara tidak akan lepas sebagaimana hubungan Negara dan agama. Keduanya menjadi bahan perbincangan yang tak pernah kering dalam sejarah umat islam. Keduanya juga memiliki misi yang sama dalam kehidupan, yakni merealisasikan kebahagiaan hidup di dunia, menciptakan kemaslahatan bersama serta mengatur hubungan sesama umat manusia. (Siraj,1999; 91)

Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yastrib (Madinah) maka tugas pokoknya sebagai utusan Tuhan adalah mengisi ajaran-ajaran ketauhidan dan keislaman ke dalam sanubari umat. Dalam proses ini, Nabi seringkali menerima wahyu yang berkaitan dengan tugas-tugasnya di Mekah, sehingga dikenallah ada ayat-ayat Makiyah yakni ayat-ayat turun ketika Nabi tiba di Mekah. Dakwah

Nabi yang pertama ditujukan kepada anggota keluarganya yang intinya ke-Esaan Tuhan. (Thomas W. Arnold, 1979; 10).

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, maka beliau memikul dua tanggungjawab. Jika di Mekah, Nabi hanya berfungsi sebagai pemimpin agama, maka di Madinah beliau berfungsi ganda, di samping mengurus persoalan-persoalan umat dalam bidang agama ia juga berfungsi sebagai kepala Negara yang punya tanggung jawab mengatur tata kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama bagi negeri Madinah yang plural. Aktivitas yang dilakukan di Madinah berupa aktivitas sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan ketertiban mensosialisasikan perlunya persaudaraan diantara kaum muslimin. Dari sinilah Nabi mulai mengadakan persentuhan antara kebutuhan agama dan negara yang ditandai oleh munculnya aturan kebernegeraan termasuk dakwah yang terdapat dalam Piagam Madinah.(Sjadzali, 1990 10-15).

Menurut Syed Mahmudunnasir, persentuhan islam (baca : agama) dan Negara dibawah kepemimpinan Nabi merupakan yang pertama kalinya. (Mahmudunnasir, 1988; 130).Masalah hubungan dakwah (agama) dengan Negara telah muncul kepermukaan dalam serangkaian polemik dan perdebatan pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ini. Perdebatan ini tampaknya diawali dengan terjadinya revolusi kaum muda Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasya. Ia memelopori lahirnya republik Turki sekuler yang dengan tegas memisahkan “urusan keagamaan dan urusan kenegaraan” Dalam tahun yang hampir bersamaan dengan revolusi di Turki itu, seorang hakim Mahkamah Syari’ah di Mesir, Syeikh ‘Ali ‘ Abd al-Raziq menerbitkan buku Al-Islam wa Usul al Hukm (Islam dan Asas-asas Pemerintahan).

Inti dari isi buku tersebut adalah agama Islam tidak mengenal lembaga kenegaraan. Isi buku tersebut tidak saja menimbulkan kegaduhan di kalangan ulama-ulama al-Azhar, tetapi gaung perdebatannya terdengar pula di Indonesia. Paham tersebut mendapat sambutan baik di kalangan kelompok nasionalis sekuler. Namun mendapat tantangan keras dari kalangan modernis Muslim terutama oleh Muhammad Natsir, karena paham ini menurut beliau sekularisme dalam kehidupan kenegaraan yang tidak sejalan dengan asas-asas Islam.(Natsir, 1973; 9). Begitu juga dengan Hamka dalam karyanya yang pertama tentang politik (Revolusi Agama) (1946) dengan tegas ia menolak teori pemisahan agama

sebagai agama dakwah dengan Negara Islam. Menurut beliau bukanlah sekedar agama, tetapi juga sebuah ideology yang meliputi “langit-bumi, benda nyawa, dunia akhirat. (Hamka, 1984; 89-90)

Sekalipun agama dan Negara haruslah disatukan namun menurut Hamka berulang kali menegaskan bahwa penyatuan itu tidaklah membawa implikasi berdirinya sebuah Negara teokrasi, yang digunakan oleh golongan nasionalis sekuler dalam menentang ide Negara Islam di Indonesia. Hamka menjelaskan: Agama Islam adalah kepunyaan tiap orang-orang yang beriman. Dalam Islam tidak ada jabatan kepala agama. Tidak ada bapak Domine yang harus menjadi perantaraan diantara manusia dengan Allah. Golongan yang disebut ulama, tidaklah diberi hak untuk menguasai agama dan tidak ada suatu kasta semata-mata hanya mengurus agama, sehingga orang banyak harus menunggu keputusan beliau.

Kalau suatu agama harus dikuasai oleh seseorang, pada hal tidak mendapat surat keputusan dari Tuhan buat mengatur, maka orang lain berhak merampas agama itu dari tangannya dan mendemokrasikannya kembali. Suatu paham dari seorang ulama Islam, boleh ditolak oleh ulama yang lain. Arti sejati dari perkataan ulama adalah orang yang berilmu. Hanya tradisi buatan manusialah yang mempersempit daerah (wilayah pemahaman) itu. (Hamka, 1984; 101)

Agama (dakwah) dan Negara adalah dua satuan yang berbeda hakikatnya. Agama adalah kabar gembira dan peringatan (*basyiran wa nazira* (QS. Al-Baqarah (2):119) yang mesti disampaikan kepada umat, sedangkan Negara adalah kekuatan pemaksa (*coercion*). (Wijoyo, 1997; 191). Agama punya khatib, da'i, kiai dan dz yang berkewajiban menyampaikan pesan, baik pesan atas nama lembaga negara maupun pesan atas nama individu atau melalui lembaga-lembaga pendidikan, dakwah dan sosial.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, agama dan negara merupakan dua institusi yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi manusia. Hanya saja kedua institusi ini terkadang manusia rela mengorbankan dirinya, apakah itu untuk memperoleh gelar *syahid* atau *syuhada* dalam pandangan agama atau untuk memperoleh gelar sebagai pahlawan dalam pandangan negara. Dari sini terlihat ada perbedaan, tetapi esensi atau substansi keduanya sama. Dengan demikian,

hubungan dakwah dan Negara tidak akan lepas. Keduanya saling membutuhkan untuk saling mengisi dan menutupi kekurangan yang ada. Hubungan agama dan Negara terkait beberapa aspek :

1. Aspek Ideologi

Istilah ideology biasanya kita temukan dalam partai politik. Mendengar atau membaca, pikiran kita tertuju kepada perjuangan politik. Partai politik yang baik dapat merumuskan cita dan keyakinannya, pola mengenai susunan masyarakat dan haluan kenegaraan yang hendak dijalankan setelah menang dan memegang kekuasaan.

Untuk memenangkan ideology yang dianutnya, partai politik menyusun rangka perjuangan, menetapkan cara berjuang, membuat strategi umum dan taktik berjuang. Dalam dakwah juga kita mengenal adanya strategi bahkan dalam rumusan cita, pola dan keyakinan yang ditawarkan kepada audiens strategi dakwah sangat menentukan hasil dari perjuangan. Dari uraian ini memberikan gambaran bahwa ideology dan strategi dakwah sebagai sektor perjuangan yang paling depan bagi ummat Islam. Ideologi sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya yaitu secara moral dapat dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan.(Alfian, 1992; 187)

Apa sesungguhnya ideology dakwah dan bagaimanapun strategi dakwah di tengah-tengah rumitnya persoalan bangsa? Pertanyaan ini merupakan pangkal tolak bagi juru dakwah yang ingin maju ke tengah-tengah manusia. Oleh karenanya segala ideology yang pernah kita kenal, bersumber kepada asas hidup, filsafat dan pandangan hidup. Ideologi dakwah Islam adalah Ideologi Islam, pandangan hidup Islam, filsafat hidup menurut ajaran Islam.

Ideologi dakwah atau ideologi Islam yang hendak didakwahkan itu adalah pancaran sinar dari asas hidup Islam, yang dituturkan wahyu. Bersumber kepada wahyu kita membuat rumus, pola dan formula, dari ideologi yang hendak kita dakwahkan. Bertolak dari asas hidup Islam, kita bentuk *wijhah* perjuangan. *Wijhah* yang jelas *qa'idah* yang kuat, akan memahirkan kita dan menuntun kita dalam memilih *khid'ah* dan *makidah* perjuangan. Jika semua didukung oleh pemikir dan pejuang yang berwatak yang bermoral dan berkarakter, maka

perjuangan yang dikendalikannya akan dapat dijadikan tumpangan-kepercayaan umat yang berjuang. (Anshary, 1991 :59 – 62) Demikian pula dengan ideologi Negara Indonesia yaitu pancasila jika didukung oleh pemikir dan pejuang yang berwatak yang bermoral dan berkarakter, maka perjuangan yang dikendalikannya akan dapat dijadikan tumpangan-kepercayaan rakyat (umat).

Satu hal yang tampaknya harus dimiliki agar suatu ideologi tetap relevan dan digandrungi masyarakat adalah sikap fleksibilitasnya. Ideologi tidak boleh kaku terhadap perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat. Demikian halnya dakwah harus mampu membaca situasi dan kondisi sehingga penerimaan masyarakat berlangsung secara alami. Karena keliru dalam memperhitungkan perimbangan kekuatan, keliru dalam menilai situasi, kondisi dan konstelasi masyarakat. Kekeliruan perhitungan itu membawa kepada pemborosan tenaga dan dana.

2. Aspek Demokrasi

Demokrasi bisa dipahami sebagai suatu *polity* dimana semua warga negara menikmati kebebasan berbicara, berserikat, mempunyai hak yang sama di depan hukum dan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. (Murad, 1999; 59).

Dalam pelaksanaan dakwah, Nabi Muhammad saw. senantiasa memperhatikan aspek demokrasi. Beliau tidak pernah sama sekali menyinggung perasaan orang lain dan agama lain dalam dakwahnya. Beliau sosok yang sejuk dalam bersikap dan bertindak dan senantiasa dalam tuntunan wahyu Ilahi.

3. Aspek Civil Society

Civil society atau masyarakat sipil dapat diartikan masyarakat mandiri, bebas, sukarela, taat pada peraturan yang berlaku dan berfungsi sebagai alat penguasa terhadap Negara. (Murad, 1999; 78). Jika konsep *civil society* terealisasi dalam Negara, maka otomatis dengan sendirinya dakwah berhasil. Ia mampu mengubah perilaku buruk masyarakat menjadi baik, menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar, mengedepankan nilai dan prinsip keadilan, perdamaian dan permusyawaratan dalam setiap hal yang dihadapinya sebagaimana masyarakat yang dibina Nabi. Bentuk *civil society* memberikan pula kesempatan kepada lembaga dakwah untuk berdiri sendiri tanpa intervensi Negara.

4. Aspek Politik.

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Ditinjau dari Islam ada dua jenis politik, yaitu politik kualitas tinggi (*high politics*) dan politik kualitas rendah (*low politics*). Paling tidak ada tiga ciri yang harus dimiliki politik berkualitas tinggi bagi mereka yang menginginkan terselenggaranya *high politics*. Yakni :Pertama, setiap jabatan politik pada hakekatnya berupa amanah (*trust*) dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya.

Amanah itu tidak boleh disalah gunakan atau menguntungkan golongan sendiri dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dilihat sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan memelihara orde atau tertib *social* yang egalitarian. Kekuasaan betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai amanat atau “*message*” yang telah dipercayakan oleh masyarakat luas.

Kedua, Setiap jabatan politik apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif, mengandung dalam dirinya pertanggungjawaban. Sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad Saw. Setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atau tugas-tugasnya. Kesadaran akan tanggung jawab ini sangat menentukan dalam usaha kita menyelenggarakan politik berkualitas tinggi. Akan tetapi tanggung jawab ini tidak hanya dihadapan institusi-institusi atau lembaga yang bersangkutan, tetapi yang lebih penting adalah tanggung jawab di hadapan Allah, di depan mahkamah yang paling adil besok di akhirat.

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (persaudaraan), yakni persaudaraan diantara sesama manusia, dalam arti luas melampaui batas-batas etnik, ras, agama, latar belakang sosial, keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan politik kualitas tinggi akan menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat pihak lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. Sebaliknya, gaya politik yang diambil adalah yang penuh dengan ukhuwah, yaitu mencari saling pengertian dan membangun kerjasama dunia seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalfahan. (Rais, 2004 : 9 – 12).

Tiga ciri dari high politics yang sangat kondusif bagi pelaksanaan dakwah (amar ma'ruf nahi mungkar), sesuai dengan firman Allah yang terdapat ada surat Al Hajj ayat 41 “ *Mereka adalah orang-orang yang bila kami berikan kekuasaan yang teguh di muka bumi niscaya menegakkan shalat, membayar zakat dan menyeruh (manusia) berbuat kebaikan serta mencegah kemungkaran dan bagi Allah sajalah kembalinya segala macam urusan*”. Di kalangan umat Islam, dibutuhkan kader-kader politik yang tangguh dan beraqidah dan menguasai persoalan-persoalan politik, serta kaitannya dengan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, budaya psikologi dan lain sebagainya.

C. Peran Dakwah dalam Negara

Islam adalah agama Allah yang terakhir, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang sempurna dan diridhai Allah, yang mampu membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan, dan mengantarkan manusia untuk hidup penuh kedamaian dan kebahagiaan.

Islam berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Swt secara penuh, akan mampu membebaskan manusia dari berbagai macam belenggu kehidupan yang memasung dan merenggut kebebasannya. Dengan berserah diri kepada Allah Swt, manusia terbebaskan kepada perbuatan syirik. Manusia terbebas dari ketergantungan kepada pohon-pohon besar, roh-roh halus, adat istiadat yang buruk, benda-benda (materialistic), dan lain-lain yang mengungkung kebebasan manusia. Tanpa berserah diri kepada Allah manusia akan selalu terikat pada hal-hal tersebut, sehingga hidupnya tidak bebas. Karena itu dengan berserah diri kepada Allah, harkat manusia menjadi terangkat, manusia mempunyai kedudukan yang tinggi, bahkan tertinggi diantara semua makhluk yang ada di alam semesta. Oleh karenanya pantaslah para tokoh-tokoh pejuang Islam dengan gigihnya berjuang dan mempertahankan Negara kesatuan Indonesia sampai mereka terbebas dari penjajahan yang membuat mereka terbelenggu.

Sejak Indonesia meringkuk dalam belunggu imperialism asing, kolonialisme Nasrani selama tiga seperdua abad dan Fasisme Majusi selama tiga seperdua tahun, bukan hanya dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan, tapi meletakkan tujuan paling akhir likuidasi agama, perlawanan

yang pertama-tama sekali terhadap imperialisme itu adalah dipelopori oleh pahlawan Islam. Artinya sejak masa penjajahan umat Islam sudah mulai memerankan fungsinya di Negara Indonesia yang kita cintai ini.

Selama 350 tahun imperialisme Belanda menegakkan kekuasaannya di Indonesia, kekayaan tanah air kita dihisabnya, kebudayaan kita diracuninya, agama kita ditindasnya, kekuatan Indonesia dirampas dari nenek moyang kita, misi dan zending dibantunya dengan kekuasaan politik dan keuangan yang dirampasnya di Negara kita.

Program jangka panjang di tangan kaum imperialis ialah hendak mengkristenkan bangsa Indonesia seluruhnya, hendak melikwidir Agama Islam dari muka bumi Indonesia. Demikian halnya dengan imperialisme barat lainnya seperti Inggris, Perancis, Amerika dan sekutu lainnya bekerja sama ingin menaklukkan bangsa Indonesia, merampas rezeki dan kehormatan bangsa, menukar agama anak negeri dengan agama yang dibawanya, yaitu Nasrani. (Anshary 1991; 51)

Dengan kondisi Negara yang tertindas seperti yang dijelaskan di atas, muncullah pejuang-pejuang Islam, seperti pimpinan Imam Bonjol dengan perang Padrinya di Minangkabali ini, Tengku Umar dengan perang yang terjadi di Aceh, dan Sulthan Babullah di Ternate, semuanya digerakkan dan dipimpin langsung oleh pahlawan-pahlawan Islam yang gagah berani. Apa yang menjadi inspirasi dari para pahlawan Islam? Yang menjadi inspirasi umat Islam adalah ajaran Islam itu sendiri yang pada hakekatnya anti imperialisme dan kolonialisme, anti penghisapan dan perbudakan.

Secara formil perlawanan dan perang kemerdekaan yang digerakkan oleh pahlawan-pahlawan Islam tidak berhasil, karena mereka berhadapan dengan organisasi dan teknik yang lebih modern dari kaum penjajah, akan tetapi moral perjuangannya sampai kepada revolusi Agustus 1945. Dari perjuangan senjata berkuah darah, pindah keperjuangan lisan melalui dakwah.

350 tahun imperialisme Nasrani di Indonesia berusaha menggunakan tiga M, yaitu *Mercenary*, *Missionary*, *Military*, (Laba, Gereja dan tentara) untuk melikwidir agama Islam di negeri ini, namun tujuan akhir itu tidak pernah tercapai. Malah justru yang mengusir penjajah di bumi Indonesia adalah kaum muslimin Indonesia. (Anshary, 1991: 53). Belanda-Nasrani meninggalkan

Indonesia Fasisme-Majusi dating yang kejamnya lebih dari imperialism Nasrani. Dia memerintah selama tiga seperdua tahun, segala organisasi Islam yang dibangun di zaman kolonial dilumpuhkan, kiblat umat Islam hendak digantinya, melalui doktrin *seikerei ruku' kea rah Tokyo* sambil memusatkan hati kepada Tenno Heika, keturunan Dewata yang katanya turun dari khayangan untuk memakmurkan manusia dalam lingkungan Asia Raya (Anshary, 1991:53).

Ribuan muballigh dan mujahid Islam yang dimasukkan dalam penjara dan kamp-kamp tahanan fasisme Majusi Jepang, tapi segala itu tidak mematahkan perjuangan para juru dakwah, malah telah menolong para Muballigh berbicara kepada Umat Islam bahwa Jepang adalah bangsa yang zhalim yang harus diusir dari negeri ini. Kalau Republik Indonesia kini telah diakui sebagai Imam dari perjuangan anti imperialism oleh seluruh bangsa bangsa Afro-Asia itu adalah wajah semangat bangsa Indonesia. Wajah semangat bukan hanya buatan Revolusi Agustus, tapi telah di bina oleh para pahlawan Islam (Anshary, 1991; 57-58).

Sejak zaman penjajahan seperti yang telah diuraikan di atas ummat Islam dalam hal ini muballigh semakin gigih berkomunikasi dengan ummat Islam lainnya, baik melalui khutbah jumat, melalui pengajian setiap subuh, bahkan melalui dakwah, para juru dakwah berkomunikasi secara rutin dengan muballigh lain terutama dalam hal menyusun perlawanan, membangun semangat dan jiwa jihad. Dengan komunikasi yang dibangun oleh para pejuang kita, semangat mereka selalu berkobar bahkan laksana api yang telah padam berkobar kembali.

Salah satu prinsip muballigh adalah sepanjang komunikasi jalan terus maka semangat hidup tetap berkobar. Karena itu dalam membangun suatu bangsa komunikasi sangat diperlukan. Negara butuh komunikasi, termasuk dakwah. negara tanpa dakwah atau komunikasi tak mungkin akan terdengar segala persoalan yang sedang melandanya, sehingga keberadaan dakwah sebagai wadah penyampai dan pensosialisasi akan memberi dampak yang sangat positif bagi kemajuan Negara.

Menyimak hal di atas, dakwah harus lebih cerdas menangkap aspek kebutuhan Negara terhadap dirinya. Dakwah tak lain adalah penyambung komunikasi antara Negara dan warga Negara. Program pemerintah serta berbagai kebijakannya dalam berbagai hal tak dapat tersosialisasi dengan baik dan sampai

kepada masyarakat kecuali melalui unsur komunikasi. Misalnya, ketika terjadi berbagai kerusuhan di daerah seperti kasus pembantaian dukun santet di Jawa Timur, konflik antar agama di Ambon, Jakarta, Kupang dan daerah-daerah lain, penjarahan-penjarahan di kota besar dan berbagai macam tindakan anarkis lainnya dapat diredakan dan didinginkan oleh para da'i. Ketenangan dan kedamaian yang tercipta dalam negara akan merangsang pula pemerintah untuk bekerja semaksimal mungkin untuk rakyatnya. Penciptaan ketenangan itu berkat peran serta da' sebagai pembimbing masyarakat.

Demikian pula jika dakwah diartikan sebagai komunikasi dan jurnalistik bagian dari komunikasi yang berita-berita positifnya telah mampu menciptakan suasana yang harmonis bagi terciptanya negeri yang aman. Pensosialisasian gerakan pencegahan HIV dan Narkoba merupakan ancaman bagi Negara, telah melibataktifkan para da'i. di samping itu, dakwah yang disampaikan oleh para da'I, kiyai, uztas dan siapa saja yang peduli akan kebaikan menjadi alat kontrol terhadap Negara, ini berkaitan dengan peran dakwah dalam masyarakat sipil.

Demikianlah peran dakwah dalam kapasitas Nabi sebagai kepala Negara di Madinah yang mampu membawa masyarakat Madinah menghargai adanya perbedaan, toleransi terhadap agama lain dan saling tolong menolong. Nabi Muhammad menjadi figur pemimpin yang patut diteladani. Dakwahnya sangat ampuh dalam pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Agar dakwah berperan secara baik khususnya di Indonesia, ada beberapa poin penting:

1. Komponen dan aspek dakwah harus benar-benar ditata secara professional sesuai tuntutan masyarakat informasi.
2. Dakwah tidak boleh berpihak pada satu kelompok.
3. Pluralisme yang menjadi ciri masyarakat Indonesia harus menjadi persoalan serius sebagai tanggung jawab moral dari umat yang mayoritas.
4. Para da'i harus mempunyai wawasan yang luas agar tidak ketinggalan dari audiensnya.
5. Dakwah islam harus diarahkan untuk memberi kesadaran ukhuwah yang universal dalam rangka mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Baik tidaknya dakwah sepenuhnya terletak pada siapa yang berdakwah dan sejauh mana kemampuannya membaca situasi dan kondisi khalayak. Hanya yang profesional yang akan memberikan yang terbaik.

Terlepas profesionalitas seorang da'i atau tidak kita harus belajar dari sejarah yaitu perjalanan dakwah nabi Muhammad saw. Dengan melihat situasi sekarang ini kemungkarannya dari hari ke hari semakin bertambah seiring tenaga da'i juga semakin bertambah. Sementara tujuan dakwah adalah mencegah terjadinya kemungkarannya. Jika kita melihat aktivitas dakwah berjalan lancar seperti biasanya.

Menurut hemat penulis ada sesuatu yang pincang dalam pelaksanaan dakwah yaitu tidak sesuai dengan sabda Rasulullah saw yaitu Barang siapa yang melihat kemungkarannya hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya atau kekuasaannya, apabila tidak mampu dengan tangannya maka hendaklah dengan lisannya dan apabila tidak mampu dengan lisannya hendaklah dengan hatinya walaupun yang demikian itu selemah-lemah iman.

Berdasarkan hadis tersebut di atas maka yang berada pada garis depan sebagai pelaksana dakwah adalah pihak yang mempunyai power dalam hal ini penguasa. Sebagai contoh; ketika gubernur Sulawesi Tenggara menginstruksikan bahwa pada hari Jum'at semua pegawai Pemprov jam kerjanya sampai jam 11.00. setelah pulang dari kantor langsung ke Masjid Agung Al Kautsar untuk melaksanakan Shalat Jumat bagi kaum muslimin. Atas instruksi itu semua pegawai muslim melaksanakan shalat Jumat di masjid yang dimaksud. Begitu juga pelaksanaan tarwih pertama Ramadhan di Masjid Al Alam yang letaknya di tengah laut, jauh dari pemukiman (rumah penduduk), karena kekuatan atau power sebagai seorang gubernur maka Masjid Al Alam dikunjungi banyak jama'ah terutama pegawai pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara. Pemaparan di atas terkait dalam hal amar ma'ruf.

Dalam hal nahi mungkar pun juga pihak penguasa dalam hal ini pemerintah sangat berpengaruh dalam mencegah kemungkarannya. Sebagaimana kita maklum bahwa hampir semua kepala daerah melarang membuka tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan, karena tempat ini akan memancing terjadinya kemaksiatan yaitu terjadinya perzinahan yang di dalam ajaran agama Islam seburuk-buruk langkah. Sangat disayangkan karena pelarangan ini hanya

sebatas bulan Ramadhan. Begitu juga pabrik minuman keras kalau pemerintah melalui perindustrian dan perdagangan menginstruksikan untuk di tutup maka perusahaan tersebut ditutup. Karena minuman keras adalah minuman yang diharamkan dalam ajaran Islam dan juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Islam adalah agama dakwah, agama rahmatan lil'alamiin, karena sebagai rahmatan lil alamiin maka Islam sangat membenci kemaksiatan. Cinta kepada Islam berarti kita cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tentu kita tidak menginginkan Indonesia ini hancur karena maksiat. Kemungkaran dapat diminimalisir jika peran ulama (dengan dakwah billisannya) dan peran pemerintah (dengan dakwah bil halnya) dapat bersatu sehingga Negara Indonesia dapat menjadi Negara yang indah, subur makmur di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Pengampun.

PENUTUP

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara dan dakwah adalah dua *term* yang saling mengikat dan saling mengisi kekurangan yang ada, dalam arti bahwa negara tak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya dakwah (dalam arti yang luas). Demikian pula dakwah tak akan mampu menyampaikan pesan luhurnya bila tak bersahabat dengan Negara. Negara merupakan wadah bagi dakwah untuk menegakkan pesan *ke-Tuhan-an*, keduniaan dan keakhiratan.

Dakwah telah dan akan selalu memberikan kontribusi bagi pelaksanaan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Dakwah pula sebagai wadah penyampaian berbagai kebijakan dan program pemerintah. Dakwah telah terbukti meredam berbagai gejolak dalam kehidupan bernegara dan konflik antar berbagai suku, golongan, agama dan ras. Di samping itu, dakwah punya tanggung jawab bagi segala upaya pencegahan generasi dari berbagai tindakan *a moral* seperti konsumsi narkoba, HIV dan lain-lain.

Keterkaitan antara Negara dan dakwah tercermin dalam perilaku Rasulullah saw. Beliau telah memikul dua tanggung jawab sebagai pemimpin agama yang punya kewajiban menyampaikan dakwah kepada umat dan sebagai kepala Negara yang punya tanggung jawab bagi berlangsungnya kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Siraj, Said, *Islam Kebangsaan; Fiqh Demokratif Kaum Santri*. Cet. I; Jakarta: Fatma Press, 1999.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992
- Anis, Ibrahim et.al., *al Mu'jam al-Wasit*, Juz I Cetakan II; Istambul: al-Maktab al-Islamiy, 1972
- Anshari Isa, *Mujahid Dakwah* Cetakan IV; Bandung: Diponegoro, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II. Cetakan III; Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Hamka, *Islam: Revolusi ideology dan keadilan social*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984.
- _____, *Ideologi Islam* Suara Partai Masjumi, Majalah bulanan resmi PP Masyumi, th.Viii Nomor 12 Desember 1956.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam It's Concepts and History*. Diterjemahkan oleh Adang Affandi dengan Judul *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Cet VII; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1988.
- Rais Amin, *Hubungan antara politik dan Dakwah berguru kepada M.Natsir*, Cetakan pertama; Bandung: Mujahid, 2004
- Salim, Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* Cetakan II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*. Cet II; Jakarta; UI Press, 1990
- Sundaussen, Ulf dalam Ma'mun Murad, *Pemikiran Politik Gusdur-Amin Rais-Tentang Negara*. Cetakan I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- W. Arnold, Thomas, *The Preaching of Islam*, diterjemahkan oleh Nawawi Ramli. Cetakan I; Jakarta: PT. Bumi Restu. 1979.
- Wijoyo, Kunto, *Identitas Politik Ummat Islam*. Cetakan II; Jakarta: Mizan, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya, t.th.